

**TRANSISI KELUARGA DI INDONESIA :
PERSPEKTIF GLOBAL**

Oleh :
Dr. Sri Harjati Hatmadji
(Lembaga Demografi, FE-UI)

Disampaikan pada seminar:
**Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia**
21-22 September 1983, Kampus IPB Darmaga Bogor

TRANSISI KELUARGA DI INDONESIA : PERSPEKTIF GLOBAL

Oleh :
Sri Harijati Hatmadji
Evi Nurvidya Anwar

1. Transisi Demografi

Transisi demografi yang menunjukkan perubahan kondisi demografis suatu negara atau wilayah dari keadaan dengan angka kematian dan angka kelahiran yang tinggi menuju keadaan dengan angka kematian dan angka kelahiran yang rendah. Dengan demikian angka pertumbuhan di kedua kutub perubahan tersebut sama-sama rendah karena perbedaan kematian dan kelahiran yang kecil.

Dalam proses perubahannya angka kematian mengalami perubahan terlebih dulu. Ketika angka kematian mulai menurun sementara angka kelahiran masih tetap tinggi dan belum berubah maka mulai terlihat perbedaan antara kematian dan kelahiran yang semakin membesar akibatnya angka pertumbuhan penduduk mulai meningkat. Pada saat ini angka kematian menurun dengan tajam namun tidak disertai penurunan yang cepat pula di dalam angka kelahiran, terjadilah angka pertumbuhan penduduk tinggi. Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan penduduk yang lahir tetap banyak tetapi teknologi untuk mencegah kematian tak lagi menyebabkan mereka mudah mati. Akibat selanjutnya terjadi peledakan penduduk khususnya peledakan penduduk muda. Struktur penduduk mengalami perubahan, proporsi penduduk muda meningkat dengan pesat. Di dalam keluarga juga terjadi perubahan, anak-anak yang bertahan hidup (*survive*) makin banyak akibatnya ukuran keluarga (*family size*) makin besar. Anak banyak, kebutuhan pun meningkat, akibatnya beban ekonomi keluarga juga meningkat.

Pengalaman di negara-negara Eropa tentang perubahan angka kematian, dari angka yang tinggi ke angka yang rendah membutuhkan waktu kira-kira selama 200 tahun, tepatnya mulai abad ke-18 sampai abad ke-20. Penurunan angka kematian di negara-negara Eropa diawali dengan adanya suatu perubahan sosial dan teknologi seperti revolusi pertanian, industrialisasi, serta perbaikan transportasi dan komunikasi (Matras, 1977).

Untuk menekan peledakan penduduk, upaya-upaya pun dilakukan terutama upaya untuk menurunkan angka kelahiran. Kematian merupakan peristiwa yang tak diinginkan oleh setiap orang sehingga upaya-upaya ke arah itu dengan mudah dapat diterima. Namun kelahiran bagi banyak orang merupakan suatu hal yang diinginkan sehingga upaya untuk menekan kelahiran tidak mudah diterima. Pengalaman negara-negara Eropa angka kelahiran baru mulai menurun pada abad ke-19, atau 100 tahun lebih lambat dari penurunan angka kema-

tian. Pengalaman di Eropa ini sekaligus memperlihatkan bahwa penurunan angka kematian terjadi pada keadaan ekonomi sosial yang jauh lebih baik dari keadaan dimana terjadi penurunan angka kematian. Lalu bagaimana dengan transisi demografi yang terjadi di Indonesia.

2. Transisi Demografi di Indonesia

Pada tahun 1930-1940 kondisi kematian dan kelahiran di Indonesia sangat tidak menggembirakan, angka kematian cukup tinggi demikian pula dengan angka kelahiran. Angka kematian kasar pada masa itu di atas 35, artinya ada 35 kematian dari 100 penduduk (Nitisastro, 1970). Tingginya angka kematian di Indonesia saat itu berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang kurang baik dan dalam masa peperangan merebut kemerdekaan. Penyakit infeksi dan kematian karena peperangan menjadi penyebab utama kematian saat itu.

Dengan kemajuan teknologi kedokteran yang terjadi di negara maju seperti ditemukannya antibiotik, Indonesia dapat mengadopsi hal itu dengan mudah. Penyakit-penyakit infeksi mulai dapat diatasi sehingga angka kematian di Indonesia dapat segera diturunkan tanpa harus menunggu kemajuan sosial ekonomi terlebih dahulu. Angka kematian mulai menurun kira-kira tahun 1950-an. Angka kematian menurun dengan cepat hanya dalam waktu yang singkat, kira-kira 50 tahun, waktu yang jauh lebih kecil dibandingkan pengalaman negara-negara Eropa. Dengan demikian Indonesia telah mengalami revolusi demografi yang pertama, yaitu revolusi kematian.

Angka kematian telah menurun terus sementara angka kelahiran masih belum turun. Berarti jumlah penduduk yang lahir masih tetap tinggi dan mereka pun mampu bertahan hidup. Dampaknya segera terlihat yaitu terjadi peledakan penduduk (*population explosion*) khususnya penduduk muda. Jumlah mereka, penduduk berumur kurang dari 14 tahun, meningkat dengan pesat terutama periode 1961-1971 yaitu dari 40,5 juta di tahun 1961 menjadi 52,0 juta di tahun 1971. Pada periode tersebut laju pertumbuhan penduduk muda melebihi laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk melaju dengan kecepatan sebanyak 2,06 persen per tahun sedangkan jumlah penduduk muda bertambah sebanyak 2,50 persen per tahun.

Peledakan penduduk ini harus segera diikuti dengan upaya lain untuk menekan pertumbuhan penduduk yaitu upaya untuk menurunkan angka kelahiran. Seperti halnya penurunan angka kematian, penurunan angka kelahiran pun dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu kemajuan sosial ekonomi Indonesia pada tingkat tertentu. Dengan memanfaatkan kemajuan di negara maju, Indonesia mampu mengadopsi teknologi pengaturan kelahiran melalui kontrasepsi.



Dengan demikian revolusi demografi Indonesia yang pertama ini segera diikuti dengan revolusi yang kedua, yaitu revolusi kelahiran. Revolusi kelahiran mulai terjadi pada akhir tahun 1970-an. Berarti penurunan angka kelahiran kira-kira dua puluh tahun lebih lambat daripada penurunan angka kematian. Sementara pengalaman negara di Eropa proses tersebut memakan waktu selama kira-kira satu abad.

Walaupun angka kelahiran telah mulai menurun, dampak kelahiran yang tinggi di masa lampau masih terlihat pada angka pertumbuhan penduduk yang meningkat dari periode 1961-1971 ke periode 1970-1980, yaitu dari 2,06 persen menjadi 2,39 persen. Dampak penurunan angka kelahiran yang menurun pada angka pertumbuhan penduduk baru terlihat di periode 1980-1990, angka pertumbuhan penduduk menjadi 1,99 persen (Gambar 1).

Angka kelahiran yang menurun ini segera terasa pada penurunan angka pertumbuhan penduduk muda. Pada periode berikutnya, 1971-1980, pertumbuhannya telah menurun menjadi 1,69 persen per tahun. Bahkan pada periode 1980-1990, pertumbuhan penduduk muda telah dibawah satu persen atau tepatnya 0.90 persen. Namun secara absolut jumlah mereka masih tetap meningkat.

Angka kelahiran dan angka kematian masih terus akan menurun. Diperkirakan pada tahun 2005¹ Indonesia akan menyelesaikan transisi demografi. Pada saat itu kondisi angka kelahiran dan angka kematian di Indonesia akan menyuplai kondisi demografi di negara maju. Sementara kondisi sosial ekonomi sosial masih seperti negara berkembang.

Pada saat ini, tahun 1993, ada beberapa propinsi yang kondisi demografisnya sudah sama dengan kondisi demografis di negara maju. Keadaan ini memperlihatkan perbedaan kecepatan perubahan demografis antar propinsi di Indonesia. Lima propinsi yang telah menyelesaikan transisi demografisnya yaitu Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali dan Sulawesi Utara.

3. Dampak Transisi Demografi pada Karakteristik Penduduk

Revolusi demografi yang telah, sedang, dan akan berlangsung di Indonesia akan membawa suatu perubahan yang luas baik terhadap karakteristik penduduk yang akan terlihat pada akhir PJP II, maupun terhadap perubahan ekonomi-sosial-budaya. Karakteristik penduduk Indonesia selama PJP II akan sangat berbeda dengan karakteristik penduduk di PJP I. Karakteristik penduduk yang akan terjadi di masa depan antara lain:

1. Prediksi dari Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

3.1. Penduduk Muda Berkurang

Angka kelahiran yang menurun tidak saja memberi dampak pada penurunan angka pertumbuhan penduduk maupun angka pertumbuhan penduduk muda tetapi juga pada penurunan jumlah absolut penduduk muda. Jumlah penduduk umur kurang dari 15 tahun akan mulai menurun sejak tahun 1995. Jumlah mereka pada tahun 1995 diperkirakan akan mencapai 64 juta, padahal pada tahun 1990 jumlahnya mencapai sekitar 65,9 juta. Sedangkan jumlah pemuda (15-24) mulai menurun sejak tahun 2005 (Gambar 2).

3.2. Makin Mengkota

Penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan makin banyak. Hal ini terjadi karena 3 hal yaitu pertambahan alamiah penduduk kota, terjadi migrasi menuju perkotaan baik migrasi dari pedesaan ke perkotaan atau dari perkotaan ke perkotaan, serta terjadi pemekaran atau reklasifikasi wilayah. Angka urbanisasi Indonesia akan terus meningkat dari 30,93 persen di tahun 1990 menjadi sekitar 52 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk perkotaan bertambah dari 55,4 juta di tahun 1990 menjadi 90,3 juta di tahun 2005 dan mencapai 132,5 juta di tahun 2020. Sementara itu jumlah penduduk pedesaan mulai menyusut sejak tahun 2005 (Gambar 3).

3.3. Makin Berpendidikan

Tingkat pendidikan yang dicapai penduduk Indonesia akan makin tinggi. Apalagi dengan adanya program wajib belajar selama 9 tahun, paling tidak penduduk Indonesia di masa depan berpendidikan tamat SLP. Kecenderungan terjadinya peningkatan pendidikan telah mulai terlihat saat ini. Pada tahun 1980 sebanyak 27,5 persen penduduk Indonesia tidak/belum pernah sekolah dan sebanyak 41,0 persen tidak tamat SD. Sepuluh tahun kemudian, 1990, persentase kedua kelompok tersebut mulai menurun. Sedangkan persentase mereka yang berpendidikan SD dan yang lebih tinggi cenderung terus meningkat (Gambar 4).

3.4. Tidak Mudah Mati

Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi penyakit-penyakit infeksi melalui teknologi kedokteran dan kesehatan telah berhasil menurunkan angka kematian bayi. Angka kematian bayi yang menurun akan berdampak pada angka harapan hidup saat lahir penduduk Indonesia yang makin lama makin tinggi. Pada tahun 1990-1995 angka harapan hidup penduduk laki-laki di Indonesia 61,29 tahun dan penduduk perempuan 64,36 tahun. Diperkirakan pada akhir PJP II angka harapan hidup meningkat menjadi 68,40 tahun untuk laki-laki dan 70,56 tahun untuk perempuan (Gambar 5).

Kemajuan teknologi kesehatan dalam mengatasi penyakit-penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif telah berhasil memperpanjang hidup manusia. Dengan demikian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut pun akan mulai bermunculan. Dengan kemajuan tersebut orang-orang yang sakit dan berhasil diselamatkan hidupnya akan masih dapat melakukan aktivitas-aktivitas walaupun dengan produktivitas yang tidak optimal lagi. Mereka ini tetap hidup dan sering sakit namun penyakit mereka masih tetap dapat disembuhkan dengan adanya teknologi kesehatan yang lebih maju, sehingga sepanjang hidupnya orang tersebut sering mengalami sakit. Angka harapan hidup yang makin meningkat tidak menjamin hidup dalam keadaan sehat. Justru angka harapan hidup yang meningkat akan disertai peningkatan frekuensi sakit.

3.5. Partisipasi Kerja Perempuan Meningkat

Angka partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia pada tahun 1980 sebesar 32,65 persen. Artinya dari 100 tenaga kerja perempuan ada sebanyak 33 orang yang masuk di pasar kerja baik sebagai pekerja maupun sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 39 orang angkatan kerja per 100 tenaga kerja.

Peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja juga meningkat. Peningkatan ini bisa terjadi karena jumlah anak yang makin sedikit sehingga memberikan kesempatan pada para ibu untuk melakukan kegiatan selain mengurus anak dan rumah tangga. Ditunjang dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan umur kawin pertama yang juga semakin tinggi. Pendidikan yang semakin tinggi akan menimbulkan aspirasi hidup yang juga lebih tinggi, misalnya, rasa ingin mengaktualisasikan diri. Pendidikan perempuan yang semakin meningkat dapat juga menyebabkan mereka merasa mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada sekedar mengurus rumah tangga.

Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan akan terus berlanjut dan diperkirakan akan menjadi sekitar 62 persen pada akhir PJP II. Atau 2 dari 5 tenaga kerja perempuan adalah perempuan yang bekerja atau mencari pekerjaan. Lihat Gambar 6.

3.6. Mobilitas Meningkat

Kemajuan pembangunan dalam bidang transportasi telah memungkinkan penurunan jarak dan waktu tempuh suatu perjalanan. Kondisi yang demikian akan mendorong terjadinya arus migrasi antar satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Demikian juga dengan perbedaan kecepatan antar propinsi di Indonesia dalam transisi demografi akan mendorong terjadinya suatu migrasi tenaga kerja muda. Propinsi yang mengakhiri transisi demografi lebih cepat akan mengalami penurunan jumlah tenaga kerja muda. Sementara di propinsi yang mengakhiri transisi tersebut lebih lambat masih akan menghadapi jumlah tenaga kerja muda yang meningkat. Kondisi demikian akan mendorong migrasi tenaga kerja muda dari propinsi yang transisi demografisnya lambat ke propinsi yang transisi demografinya cepat.

Arus globalisasi informasi antar negara juga semakin lama semakin cepat. Jumlah penduduk muda yang makin berpendidikan dan makin pandai berbahasa Inggris juga makin banyak. Mereka ini yang paling cepat menangkap informasi dari luar. Di pihak lain, "harga" mereka di dalam negeri menjadi semakin merosot, namun peluang untuk memperoleh "harga" yang lebih tinggi di luar negeri semakin terbuka. Dampaknya mobilitas tenaga kerja terdidik ke luar negeri pun akan makin meningkat.

4. Transisi Keluarga

Transisi demografi dan perubahan karakteristik penduduk seperti yang telah dikemukakan juga mempunyai implikasi tersendiri pada struktur, jumlah, dan peran/fungsi keluarga di masa lalu ataupun di masa depan.

Ketika kesenjangan antara kelahiran dan kematian menimbulkan suatu peledakan penduduk dari sisi keluarga sebagai suatu unit terkecil di masyarakat juga mengalami peledakan jumlah anggota. Semula keluarga-keluarga di Indonesia walaupun mempunyai anak yang pernah dilahirkan cukup banyak namun anak berhasil hidup atau anak yang masih hidup jauh lebih sedikit daripada jumlah anak yang pernah dilahirkan. Beban ekonomi keluarga untuk menghidupi mereka ini relatif "tak terlalu berat". Namun dengan adanya kemajuan untuk mengatasi penyakit infeksi anak-anak Indonesia banyak yang tak jadi mati karena penyakit infeksi; akibatnya jumlah anggota keluarga meningkat pesat.

Kesadaran akan beratnya beban yang harus dipikul membuat pemerintah untuk segera mengatasinya melalui kebijaksanaan kependudukan. Keberhasilan program pemerintah dalam bidang kependudukan khususnya dalam menurunkan fertilitas nampaknya sudah mulai menunjukkan hasil. Keberhasilan ini antara lain akan berdampak pada perubahan struktur keluarga. Struktur keluarga akan berubah dari keluarga berukuran besar (dengan jumlah anak banyak) ke keluarga berukuran kecil (dengan sedikit anak). Jumlah keluarga inti akan semakin besar. Peran/fungsi keluarga juga akan mengalami perubahan. Dengan

demikian revolusi demografi akan disertai dengan perubahan atau transisi di dalam keluarga.

Berkaitan dengan peran/fungsi keluarga sebagai tempat yang paling awal bagi terjadinya proses tumbuh kembang seorang anak, dalam menciptakan manusia yang berkualitas, keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu dalam PJP II pemerintah dengan sadar menegaskan pentingnya keluarga sebagai wahana pembangunan bangsa.

4.1. Struktur Keluarga Makin Kecil dan Makin Tua

Struktur keluarga yang dalam hal ini didekati dari rata-rata jumlah anggota rumahtangga selama PJP I di Indonesia telah mulai berubah. Pada tahun 1971 rata-rata jumlah anggota rumahtangga di Indonesia sebesar 5,3 orang. Kira-kira dua puluh tahun berikutnya jumlah tersebut menurun menjadi 4,5 orang. Namun penurunan hampir tak terlihat selama dasawarsa pertama PJP I, yaitu dari 5,3 orang ke 5,2 orang. Penurunan yang cukup tajam baru terjadi pada periode 1980-1990, yaitu dari 5,2 menjadi 4,6 orang.

Penurunan rata-rata anggota rumahtangga tersebut di samping menunjukkan diterimanya norma keluarga kecil, juga bisa menunjukkan kecenderungan pembentukan keluarga batih atau inti (*nuclear family*) keluarga yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Kecenderungan penurunan anggota rumahtangga juga terjadi di pulau-pulau utama di Indonesia (Tabel 1). Di Jawa rata-rata anggota rumahtangga turun dari 4,7 orang di tahun 1971 menjadi 4,3 orang di tahun 1990. Demikian pula Kalimantan yang pada tahun 1971 memiliki anggota rumahtangga paling besar yaitu 5,8 orang dan pada tahun 1990 mengalami penurunan menjadi 4,6 orang.

Tabel 1. Rata-rata Anggota Rumahtangga menurut Pulau, 1971, 1980, dan 1990

Pulau	1971	1980	1990
Jawa	4,7	4,6	4,3
Sumatera	5,3	5,2	4,9
Kalimantan	5,8	5,1	4,6
Sulawesi	5,6	5,4	4,9
Pulau lain	5,4	5,2	4,8
Indonesia	5,3	5,2	4,5

Sumber : Biro Pusat Statistik (1991).

Namun perlu dicatat bahwa penurunan rata-rata anggota rumahtangga tidak persis sama dengan penurunan tingkat fertilitas, walaupun kedua hal ini berhubungan erat. Perubahan besar anggota rumahtangga ini mempunyai implikasi pada peningkatan jumlah rumahtangga yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk.

Di masa yang akan datang terjadinya penurunan jumlah penduduk muda, peningkatan pendidikan yang membawa peningkatan usia kawin pertama, serta peningkatan angka harapan hidup akan membawa dampak pada struktur umur keluarga. Secara rata-rata di masa yang akan datang akan makin banyak keluarga yang dikepalai oleh orang yang berumur lebih tua. Hasil proyeksi Biro Pusat Statistik (1993) menunjukkan bahwa pada tahun 1990 lebih dari separoh rumahtangga dikepalai oleh mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Persentase ini pada 10 tahun mendatang akan makin banyak, sedangkan kepala rumahtangga yang berumur kurang dari 40 tahun makin berkurang. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Proyeksi Persentase Rumahtangga menurut Umur Kepala Rumahtangga, 1990-2000.

Umur	1990	1995	2000
10 - 19	0,94	1,00	0,96
20 - 29	16,30	15,57	15,52
30 - 39	28,61	28,06	26,36
40 - 49	21,75	22,81	24,49
50 +	32,40	32,55	32,67
Jumlah (persen)	100	100	100
(ribuan)	39 962,8	45 273,9	51 143,9

Sumber : Diolah dari Biro Pusat Statistik (1993).

4.2. Jumlah Rumahtangga dan Keluarga Makin Banyak

Pada tahun 1980 di Indonesia terdapat kira-kira 30,4 juta rumahtangga dan pada tahun 1990 telah terjadi peningkatan lebih dari 10 juta rumahtangga sehingga menjadi 40,7 juta rumahtangga. Dengan kata lain selama 1980-1990 laju pertumbuhan rumahtangga mencapai 2,91 persen, yang lebih besar daripada pertumbuhan penduduk (1,99 persen). Dalam 15 tahun mendatang, tahun 2005 diperkirakan jumlah rumahtangga di Indonesia akan sebanyak 60,3 juta atau kira-kira dua kali lipat jumlah rumahtangga di tahun 1980 (Gambar 7).

Peningkatan jumlah rumahtangga bisa terjadi karena peningkatan yang cepat dari jumlah penduduk dewasa tepatnya usia memasuki perkawinan. Besarnya jumlah mereka ini sebagai hasil dari *baby boom* yang terjadi di masa lampau. Dampaknya baru akan terasa paling tidak sejak duapuluh tahun setelah masa *baby boom* sampai di masa mendatang.

Kecenderungan semakin menurunnya rata-rata jumlah anggota rumahtangga yang terjadi karena penurunan jumlah anak dan/atau berkurangnya anggota keluarga selain anak seperti keponakan, saudara ipar, cucu, dan sebagainya memungkinkan terjadinya pergeseran bentuk keluarga dari *exten-ded family* (termasuk keluarga besar dengan jumlah anak banyak) menjadi keluarga inti. Pada masa lalu umumnya suatu rumahtangga yang dapat dikategorikan "lebih mampu" secara ekonomi oleh keluarga lainnya maka rumahtangga tersebut akan banyak ditumpangi saudaranya. Apalagi bila rumahtangga yang lebih mampu ini tinggal di daerah perkotaan. Kita mungkin sering mendengar dan melihat di rumahtangga-rumahtangga masa lalu dimana ada anggota rumahtangga lain yang bukan pembantu namun harus membantu mengurus pekerjaan rumahtangga asalkan bisa disekolahkan. Saudara yang "menumpang" ini baru akan berpisah dari rumahtangga yang bersangkutan apabila dia sudah mampu membiayai dirinya. Namun pada masa sekarang keadaan seperti itu sudah tak banyak lagi. Sudah sulit mencari saudara (orang yang ada hubungan darah) yang mau membantu mengurus pekerjaan rumahtangga. Nampaknya pembangunan ekonomis sosial yang terus membaik telah ikut mempengaruhi pada penurunan jumlah anggota rumahtangga selain anak, sehingga mereka mampu membentuk rumahtangga baru. Akibatnya pertumbuhan ataupun jumlah absolut rumahtangga semakin besar.

Pergeseran keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil umumnya merupakan gejala yang dapat ditemui di beberapa daerah khususnya di daerah perkotaan. Salah satu karakteristik penduduk masa depan, yang akan terlihat pada akhir PJP II, yaitu penduduk yang makin mengkota sepertinya juga akan menjadi salah satu pendorong terjadinya pergeseran bentuk keluarga dari keluarga kecil yang semakin meningkat di masa depan.

Penurunan jumlah dan rata-rata anggota rumahtangga nampaknya akan bervariasi antar pulau. Jumlah rumahtangga di pulau Jawa paling banyak dan di masa depan diperkirakan akan tetap menduduki posisi paling atas. Selain itu pertambahan jumlah rumahtangga di Pulau Jawa akan paling cepat dibanding di pulau-pulau lain. Keadaan ini akan membawa implikasi yang luas pada berbagai sektor; peningkatan jumlah rumahtangga yang cukup besar mempunyai kaitan dengan peningkatan kebutuhan rumahtangga misalnya kebutuhan

akan perumahan dan pemukiman, listrik, energi, dan transportasi.

Peningkatan jumlah rumahtangga juga akan diikuti dengan me-ningkatnya jumlah keluarga, dan di masa depan jumlah keluarga inti akan meningkat. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 1990 proporsi jumlah keluarga batih terhadap jumlah rumahtangga di Indonesia sebesar 68,79 persen (Hatmadji dan Radikum, 1993), atau jumlah keluarga batih mencapai hampir 28 juta. Dengan mengasumsikan tidak ada perubahan proporsi jumlah keluarga batih terhadap jumlah rumahtangga, Gambar 8 memperlihatkan proyeksi jumlah keluarga batih dari tahun 1980 sampai 2005. Berdasarkan cara perhitungan tersebut pada tahun 2000 jumlah keluarga batih di Indonesia akan menjadi sebanyak 36,7 juta dan pada tahun 2005 sebanyak 41,5 juta.

5. Implikasi Keluarga Kecil

Dalam PJP II keluarga kecil akan menjadi pilihan pasangan suami-isteri. Padahal di PJP II seperti telah dikemukakan karakteristik penduduk Indonesia akan sangat berbeda dengan di PJP I. Dengan demikian perubahan karakteristik penduduk ini juga akan turut mewarnai keadaan keluarga di masa depan. Keadaan ini mempunyai implikasi dan konsekuensi terhadap berbagai segi kehidupan keluarga.

Dari segi kesehatan: Jumlah anak yang semakin sedikit dan disertai dengan penjarangan jarak kelahiran akan berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Penjarangan kelahiran dan berkurangnya frekuensi melahirkan akan menurunkan risiko mengalami sakit dan kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan ataupun pasca melahirkan.

Jumlah anak yang sedikit juga memungkinkan bagi si ibu untuk merawat dan mengurus anak-anaknya dengan lebih baik dan telaten. Ditunjang dengan pendidikan ibu yang relatif baik serta adanya teknologi informasi yang jauh lebih maju maka informasi-informasi mengenai kesehatan baik yang melalui media cetak ataupun audio visual dengan mudah dapat diterima para ibu. Sehingga para ibu mempunyai pengetahuan bagaimana merawat anak dengan baik dan anak tetap sehat.

Tingkat pendapatan rumahtangga tertentu dengan anak yang sedikit akan memungkinkan anggaran biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tiap anak lebih besar daripada keluarga dengan jumlah anak banyak. Konsumsi makanan yang bergizi dan baik bagi anak dapat lebih terpenuhi sehingga kesehatan anak pun meningkat. Kesehatan anak yang semakin membaik, misalnya dapat ditunjukkan dengan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) yang semakin menurun. Pada periode 1987-1990 angka kematian bayi di Indonesia sekitar

71 per 1000 kelahiran hidup. Dari Gambar 9 terlihat bahwa di akhir PJP II diperkirakan angka kematian bayi akan sebesar 34 untuk perempuan dan 41 untuk laki-laki (Ananta dan Anwar, 1992).

Dari segi ekonomi: beban ekonomi keluarga berkurang karena tanggungan keluarga menjadi kecil. Sebagai gambaran beban ekonomi keluarga di Indonesia digunakan pendekatan beban tanggungan dari tiap kepala rumahtangga. Pada periode 1871-1980 jumlah orang yang ditanggung tiap kepala rumahtangga hampir tidak berubah. Mulai dasawarsa terakhir terlihat penurunan beban yang harus ditanggung tiap kepala rumahtangga yaitu dari 3,8 di tahun 1980 menjadi 3,5 pada tahun 1990 (Tabel 3).

Dengan demikian selama dua dasawarsa yang lalu beban tanggungan keluarga di Indonesia telah mulai menurun bahkan pada dasawarsa terakhir menunjukkan kecepatan penurunan yang semakin tajam. Nampaknya laju penurunan ini akan semakin cepat paling tidak di awal PJP II. Di sisi lain jumlah anak yang makin sedikit akan meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja. Keadaan ekonomi keluarga juga akan meningkat khususnya peningkatan pendapatan keluarga. Karenanya biaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia anggota keluarga dapat ditingkatkan, dan produktivitas ekonomi juga meningkat (dapat ditingkatkan).

Tabel 3. Angka Beban Tanggungan Kepala Rumahtangga di Indonesia 1971-1990 *)

Daerah	1971	1980	1990
Perkotaan	4,29	4,19	3,74
Pedesaan	3,78	3,71	3,42
Desa + Kota	3,87	3,81	3,52

Keterangan *): Angka Beban Tanggungan Keluarga dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang bukan kepala rumahtangga dengan jumlah kepala rumahtangga.

Sumber : Diolah dari Biro Pusat Statistik berbagai publikasi Sensus Penduduk (1974, 1983 dan 1992).

Dari segi pendidikan: Jumlah anak yang semakin kecil juga akan dapat mengubah preferensi orang tua. Orang tua akan lebih memperhatikan sisi kualitas seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan beban tanggungan ekonomi keluarga yang semakin berkurang ditunjang dengan peningkatan pendapatan keluarga akan sangat memungkinkan tingkat pendidikan anak yang semakin tinggi. Di sisi lain, jumlah anak yang semakin sedikit juga memungkinkan adanya kesempatan bagi orang tua untuk dapat meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang akan ditempuh para orang tua tidak terbatas pada S1, S2 dan S3 melainkan juga bisa pendidikan non-gelar. Bagi para orang tua yang baru menamatkan sekolah dasar atau sekolah lanjutan pertama akan lebih memungkinkan untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi apalagi dengan adanya SLP dan SLA terbuka yang semakin banyak. Nampaknya di PJP II para orang tua yang masih bersekolah akan semakin banyak. Gejala semacam ini sejak saat sekarang sudah mulai terlihat.

Dari segi mobilitas: jumlah anak dan saudara yang cukup besar seringkali menjadi peghalang bagi para calon migran; ukuran keluarga yang makin kecil dapat menyebabkan mereka menjadi semakin lincah. Mereka dengan mudah dapat menjadi migran ataupun mengalami mobilitas sosial yang makin mudah, apalagi mereka yang bermigrasi ini dalam rangka perbaikan taraf hidup/kesejahteraan.

Beberapa implikasi di atas membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan peran anggota-anggota keluarga dan perubahan nilai dalam keluarga khususnya nilai anak. Misalnya, perubahan peran ayah dan ibu; secara "tradisional" peran ayah adalah kepala keluarga yaitu orang yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga. Sementara peran ibu karena dia yang melahirkan anak maka dialah yang harus mengurus anak, bukan ayah. Peran ini diakui oleh masyarakat baik secara sosio-kultur maupun ekonomi. Padahal kelahiran seorang anak manusia merupakan hasil kerjasama antara ayah dan ibu. Seharusnya kegiatan mengasuh dan mendidik anak bukan hanya tanggung jawab ibu melainkan tanggung jawab bersama ayah dan ibu.

Ketika jumlah anak di dalam suatu keluarga cukup banyak, adanya perbedaan nyata antara peran ayah dan ibu seperti di atas mungkin masih bisa diterima. Dalam kondisi seperti itu si ayah harus bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang cukup besar, sehingga dia tak punya waktu lagi untuk membantu si ibu dalam mengurus dan mendidik anak.

Demikian pula dengan si ibu yang tak punya waktu lagi untuk mengurus hal lain selain mengurus anak dan rumahtangga, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam keluarga dengan banyak anak, peran ayah dan ibu tidak berbeda nyata atau saling melengkapi.

Ketika norma keluarga kecil mulai dapat dimengerti dan diterima, serta keadaan ekonomi sosial mulai dan terus membaik, makin banyak keluarga yang mengaktualisasikan keluarga dengan anak sedikit. Perubahan peran ayah dan ibu mulai terjadi. Ayah tidak saja sebagai pencari nafkah melainkan juga sebagai pendidik dalam keluarga karena semakin besar tanggung jawab orang tua dalam hal pengasuhan anak. Peran ibu juga tidak lagi hanya sebagai pengelola rumahtangga, pendidik, dan pengasuh anak tetapi juga kecenderungannya sebagai pekerja (*employment*). Tentu saja adanya perubahan peran tersebut menuntut manajemen rumahtangga yang semakin baik dan efektif agar tercipta suatu keluarga sejahtera sebagaimana digariskan dalam UU No.10 tahun 1992. Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Perubahan nilai anak adalah bahwa anak tidak lagi sebagai jaminan hari tua, jaminan menghadapi risiko ekonomi dan sumber tenaga kerja keluarga. Pendapat "banyak anak, banyak rezeki" sudah mulai ditinggalkan dan nilai baru bahwa anak perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang sudah lebih menjadi pertimbangan. Kesejahteraan anak diutamakan, mutu anak diutamakan. Karena itu, keluarga masa depan seharusnya adalah keluarga yang lebih berkualitas.

6. Keluarga dan Produktivitas Ekonomi

Keluarga berperan dalam mempersiapkan para anggotanya memasuki tempat kerja. Dalam hal ini pengaruh keluarga melalui pembinaan kesediaan seseorang yang merupakan anggota keluarga untuk melaksanakan hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas (Djajanegara, 1993). Keluarga membekali anggota keluarganya untuk memasuki dunia kerja, dan keluarga juga memudahkan proses masuknya seseorang/anggota keluarga ke lingkungan kerja untuk melaksanakan tata nilai/pranata yang selanjutnya mengejawantahkan produktivitas.

Anggota keluarga yang memasuki dunia kerja, yang telah mempunyai kesediaan (*commitment*) untuk menjalankan pranata kerja harus juga dapat

menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerjanya, di lingkungan masyarakatnya atau di luar lingkungan keluarga. Di sini, tugas keluarga semakin berat dalam mempersiapkan anggota-anggotanya untuk melaksanakan pranata kerja dengan tanpa banyak gangguan/hambatan. Di dalam keluarga dimana si ibu turut berpartisipasi di pasar kerja akan dapat mempersiapkan secara dini pada anak-anaknya bagaimana bila mereka kelak harus memasuki dunia kerja. Dengan pengalaman yang si ibu dapatkan di pasar kerja dia akan coba tanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia kerja khususnya bagaimana meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam PJP II, dengan cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya, bagaimana peran keluarga dalam memberikan bekal pada para anggotanya untuk mengejawantahkan produktivitas merupakan tantangan besar yang sudah harus kita pikirkan sejak sekarang. Untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang memiliki dasar kemampuan untuk melanjutkan pembangunan pada umumnya, perhatian tidak cukup hanya dipusatkan pada manusia dan masyarakat, melainkan diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh atas peran keluarga dalam pembangunan, bahwa keluarga merupakan tempat awal lahir dan besarnya anggota keluarga untuk kemudian memasuki kehidupan di luar lingkungan keluarganya, yaitu kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Dalam PJP II perubahan karakteristik penduduk yang sangat berbeda terjadi akibat perubahan demografi dan perubahan ekonomi yang telah dan akan berlangsung terus yang selanjutnya juga mempengaruhi perubahan di dalam keluarga, antara lain penurunan jumlah anggota keluarga dan penekanan pada keluarga inti atau keluarga batih atau *nuclear family*. Era globalisasi informasi dan peningkatan urbanisasi cenderung membawa perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat seperti hubungan luas antara keluarga yang tidak lagi dianggap penting. Sangat disayangkan bahwa independensi serta solidaritas yang semakin menjalar terutama di kalangan muda sering diartikan sebagai penurunan peran serta tanggung jawab keluarga. Kekeliruan ini perlu segera diluruskan dan diantisipasi secara dini. Hal ini akan terkait dengan fenomena kependudukan yang akan datang, yaitu jumlah penduduk usia lanjut yang akan semakin meningkat dengan pesat. Mereka ini hendaknya dapat hidup dengan nyaman dan tenteram di dalam lingkungan keluarga dengan tiga generasi. Dengan keluarga kecil, yaitu keluarga dengan jumlah anak sedikit, bukan berarti hubungan kekeluargaan semakin menipis.

BIBLIOGRAFI

- Achir, Yaumil C. Agoes. 1993. Implikasi Perubahan Struktur Keluarga dan Pengembangan Potensinya dalam Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Keluarga. *Makalah* dalam Konferensi Kependudukan Indonesia 1993. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. 13-15 Juli 1993.
- Ananta, Aris dan Evi Nurvidya Anwar. 1992. Projection of Indonesian Population 1990-2020. Jakarta: The Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia.
- _____ dan Diah Suzenti. 1993. Revolusi Demografi di Indonesia. *Info Demografi*, Nomor 1/Mei 1993. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1984. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 1981. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- _____. 1992. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 1990. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- _____. 1993. Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi 1990-2020. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Djajanegara, Siti Oemijati. 1993. Lingkungan Keluarga dan Produktivitas. *Abstrak Makalah* pada Seminar Keluarga, Pekerja, dan Pembangunan Ekonomi. Lembaga Demografi FEUI & PAU-EK UI, 15 April 1993.
- Hatmadji, Sri Harjati dan Rini Palupi Radikun. 1993. Formasi Keluarga. *Laporan Akhir Analisis Determinan Data SPI 1990*. Lembaga Demografi FEUI, Mei 1993.
- _____, Evi Nurvidya Anwar., dan Avanti Fontana. 1993. Transisi Rumahtangga dan Keluarga di Masa Depan. *Info Demografi*, Nomor 2/Agustus 1993. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi FEUI.
- Matras, Judah. 1977. Introduction to Population: A Sociological Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

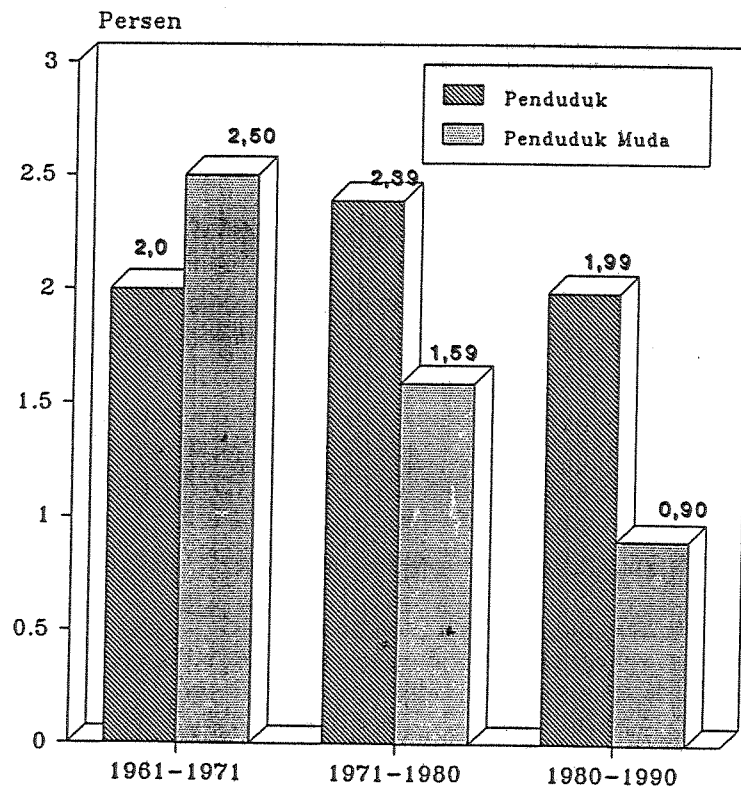
Kantor Menteri Negara KLH. 1992. Penduduk Indonesia Selama PJP I. Jakarta.

Nitisastro, Widjojo. 1970. Population Trends in Indonesia. New York: Cornell University Press.

Suyono, Haryono. 1993. Pokok-pokok Uraian tentang Peranan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Pembangunan Jangka Panjang II 1994-2018. Disampaikan kepada Peserta Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi. Jakarta, 6 Februari.

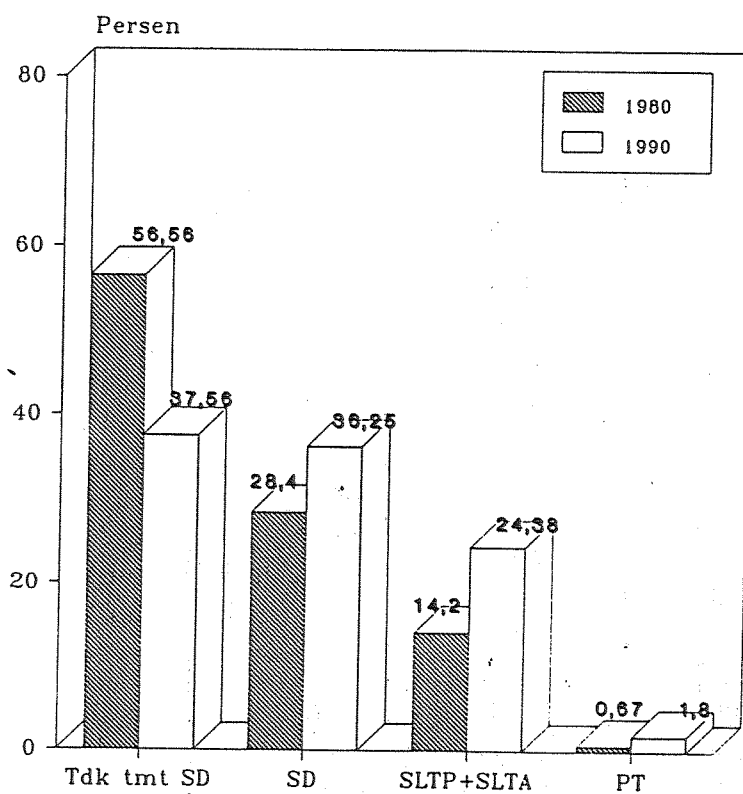
_____. 1993. Pokok-pokok Sambutan Menteri Negara Kependudukan/BKKBN pada Pertemuan Perumusan Operasionalisasi Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Forum Konsultasi LSOM Unit Pelaksana. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta 19 Mei.

Gambar 1
Angka Kecukupan Penduduk dan
Penduduk Muda di Indonesia



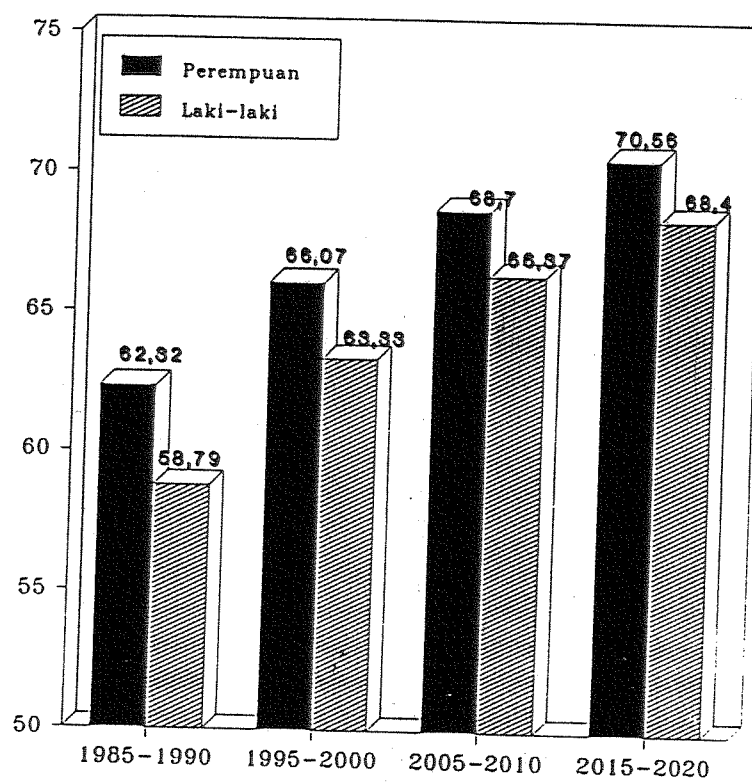
Sumber : INFO DEMOGRAFI No.1 Mei 1993.

Gambar 4
Tingkat Pendidikan Penduduk Indonesia
Usia 10 tahun ke atas, 1980 dan 1990



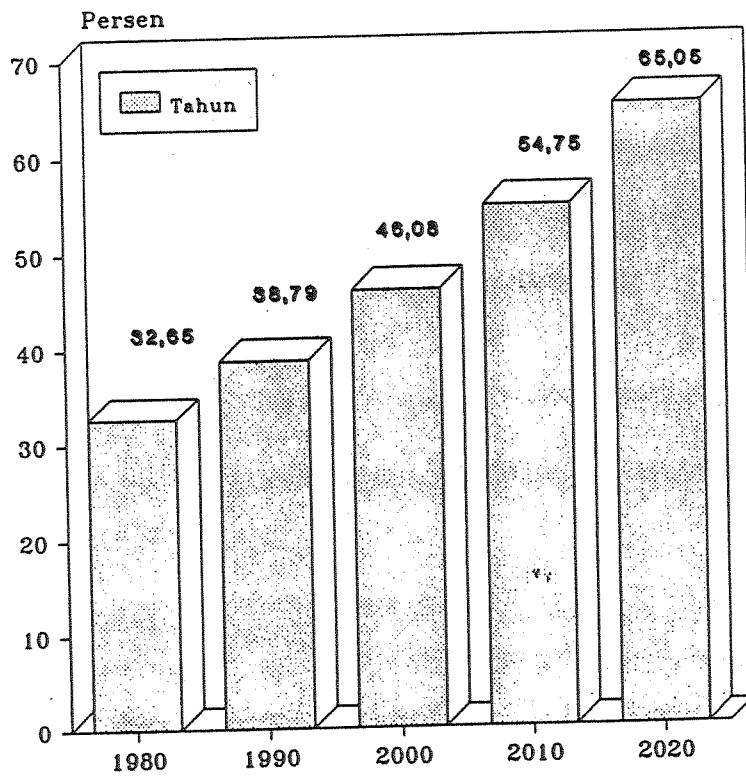
Sumber : Diolah dari BPS

Gambar 5
Angka Harapan Hidup Saat Lahir
di Indonesia, 1985-2020



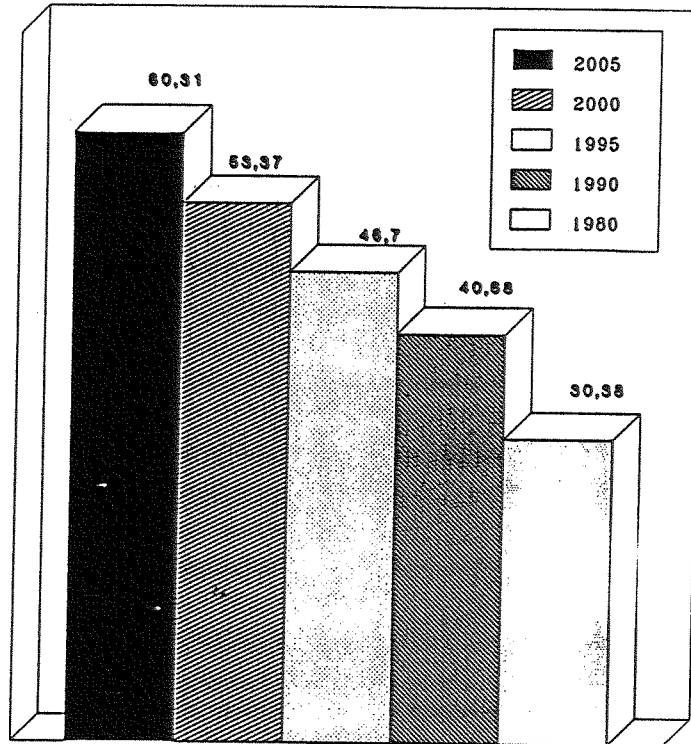
Sumber: Lembaga Demografi FEUI

Gambar 6
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan Indonesia 1980-2020



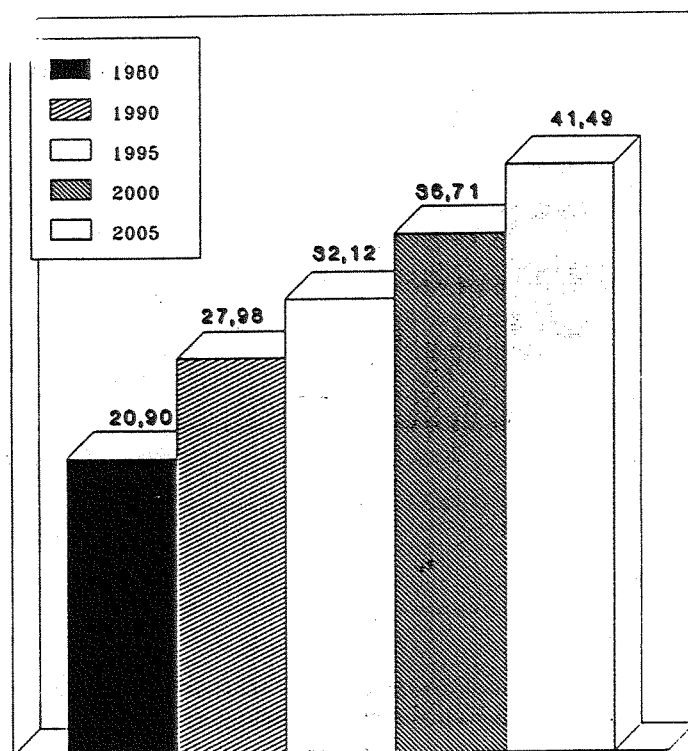
Sumber: Biro Pusat Statistik
dan Info Info Demografi No.1/Mei 1993

Gambar 7
Proyeksi Jumlah Rumahtangga
di Indonesia, 1980-2005



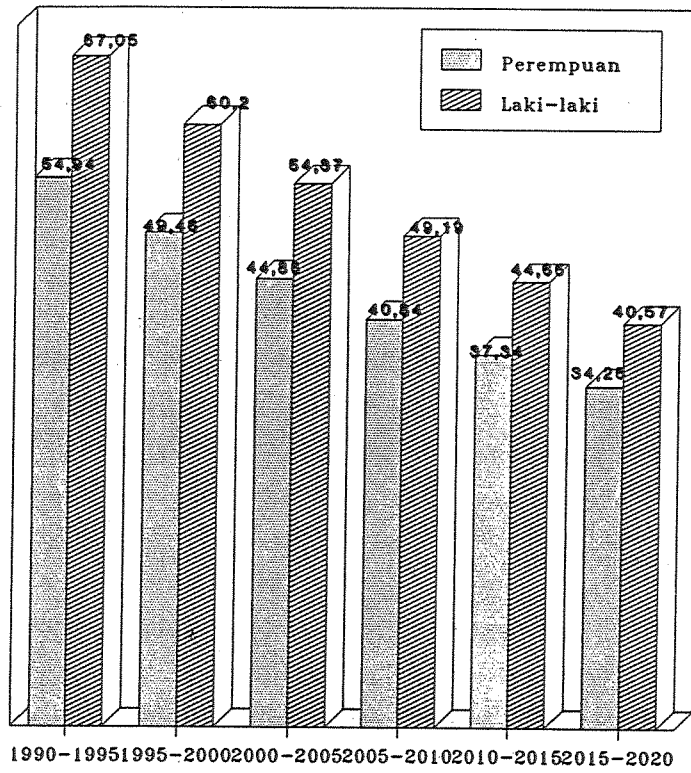
Sumber: Diolah dari Kantor Menteri
Negara KLH (1992)

Gambar 8
Proyeksi Jumlah Keluarga Batih
di Indonesia, 1980-2005 (dalam juta)



Sumber: Info Demografi No.2/Sept 1993
dan Kantor Menteri Negara KLH (1992)

Gambar 9
Angka Kematian Bayi
di Indonesia, 1990-2020



Sumber: Lembaga Demografi FEUI